

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Era paska Perang Dingin terjadi perubahan konstelasi politik internasional dari bipolar menjadi multipolar. Ini berarti dunia yang dulunya sangat dipengaruhi oleh dua kekuatan negara adidaya Amerika Serikat di satu sisi dan Uni Soviet di sisi lain menjadi tidak lagi dipengaruhi oleh dua kekuatan besar itu seperti sebelumnya. Puncak runtuhnya bipolaritas itu ditandai dengan bersatunya Jerman setelah diruntuhkannya Tembok Berlin tahun 1991. Selain itu juga kehancuran Uni Soviet pada masa Gorbachev serta pembubaran Pakta Warsawa yang merupakan pakta pertahanan Uni Soviet dan sekutunya.

Dengan runtuhnya Uni Soviet beserta paham komunismenya serta berkembangnya paham demokrasi Amerika Serikat yang melanda berbagai belahan dunia, maka terjadi perubahan drastis dalam panggung politik internasional. Dimana isu-isu yang mendominasi dalam hubungan antara negara beralih dari isu-isu politik-keamanan ke isu-isu ekonomi. Hal ini menuntut negara-negara di dunia untuk melakukan hubungan penuh perdamaian dengan berbagai negara. Hal ini dikarenakan meningkatnya kepekaan negara-negara terhadap interdependensi ekonomi. Dan akibat selanjutnya adalah berkurangnya hubungan antara negara yang bersifat *state-centric* dan kurang diperhatikannya lagi batas-batas wilayah geografis karena

1. Membahas secara ilmiah fenomena kerjasama *sister province* terutama mengenai *sister province* antara Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan Pemerintah Kyoto prefecture.
2. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan penulis.
3. Menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah terhadap realita yang ada sehingga dapat mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksikan fenomena yang ada.
4. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **C. Latar Belakang Masalah**

Secara geografis Indonesia adalah salah satu negara Asia, Asia Tenggara lebih tepatnya. Sedangkan Jepang merupakan salah satu negara Asia Timur yang pada awalnya mempunyai pengalaman yang buruk dengan Indonesia. Sehingga interaksi keduanya tidak akan luput dari perhatian masyarakat internasional.

Pada tahun 1990-an perekonomian Indonesia tergolong maju. Sekitar tahun 1990-an inilah banyak kemajuan pada bidang ekonomi yang berhasil dicapai oleh Indonesia. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia begitu cepat,

bahkan berada diatas rata-rata negara berkembang.<sup>2</sup> Posisi Jepang pun semakin mantap sebagai salah satu negara Asia yang mampu menjadi negara besar. Para pengamat menilai bahwa abad mendatang khususnya paska perang dingin Jepang termasuk dalam kategori akan menjadi kekuatan besar setelah Amerika Serikat yang secara perlahan-lahan mengurangi kekuatannya di kawasan Asia Pasifik. Keberadaan Jepang paska perang dingin tidak bisa dianggap hal yang biasa. Menurut Clyde Prestowitz abad 21 yang sudah mulai kita masuki ini, Jepang akan tampil sebagai negara adi daya yang besar<sup>3</sup> maka Jepang akan menjadi raksasa ekonomi dan politik yang terbesar abad 21.

Secara sosial, Jepang termasuk masyarakat agraris yang dalam waktu cepat mampu menjadi masyarakat yang modern. Dari negara yang semula menutup diri dari pergaulan internasional menjadi negara yang sangat berkepentingan akan hubungan internasional<sup>4</sup> demi kelangsungan hidupnya. Untuk itu Jepang merasa perlu menilai kembali kebijakan politik luar negeri dan posisinya di dunia internasional, termasuk didalamnya hubungan bilateral dengan negara lain. Seperti menjalin hubungan dengan negara-negara sesama Asia khususnya Asia Tenggara yang tergabung dalam organisasi ASEAN, salah satunya adalah Indonesia. Sebagai negara yang secara bersamaan terletak di kawasan Asia, Indonesia dan Jepang mempunyai persamaan persepsi untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kerjasama bilateral

---

<sup>2</sup> Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI : Distorsi Peluang dan Kendala*, Erlangga, Jakarta, hal 71.

<sup>3</sup> Bantarto Bandoro, "Dinamisme Pasifik dan Kebijakan Alternatif Jepang", *ANALISA CSIS, tahun XIX, No. 6*, 1990, hal 518.

<sup>4</sup> Edwin O. Rischauer, "Sistem Politik Jepang", dalam Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrew, *Perbandingan Sistem Politik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1993), hal 200.

baik melalui jalur resmi antara pemerintah kedua negara maupun melalui berbagai forum swasta. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi stabilitas dan kemakmuran kedua negara.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai salah satu propinsi di Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun di berbagai sektor pembangunan terus berusaha untuk mengembangkan program-program pembangunannya. Adapun di dalam usaha pembangunan tersebut masih banyak sektor yang harus segera dibenahi guna memaksimalkan hasil-hasil pembangunan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah DIY dari berbagai sektor adalah seperti di bidang pertanian termasuk didalamnya peternakan, masih banyak berbagai kendala yang dirasakan diantaranya seperti perlunya peningkatan pengolahan dan pemasaran produk tanaman pangan dan hortikultura serta meningkatkan pemanfaatan lahan pantai.

Kemudian di bidang kebudayaan juga masih perlu diperhatikan, seperti perlunya meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan kebudayaan DIY mengingat DIY adalah kota yang memiliki tempat-tempat bersejarah yang harus selalu dijaga.

Sementara itu sektor pendidikan juga harus diperhatikan. Seperti perlunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk menghadapi persaingan yang ketat pada era globalisasi.

Lalu di bidang industri, masih ada hambatan dalam kurangnya pengetahuan tentang agro-industri, penggunaan teknologi dalam industri, cara

mempromosikan dan memasarkan produksi ke luar negeri serta perlunya meningkatkan ekspor non migas.

Sebagai daerah yang telah diberikan hak otonomi dan kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur daerahnya sendiri termasuk dalam hal melaksanakan pembangunan daerah juga harus mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di daerahnya. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah melibatkan pihak lain untuk membantu melancarkan pembangunan daerah seperti pihak luar negeri. Akan tetapi sebelumnya Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah Pusat.

Sampai saat ini pemerintah DIY telah menjalin beberapa hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri dan kerjasama paling awal dilakukan adalah kerjasama dengan Kyoto prefecture. Seiring dengan perkembangan zaman, hubungan kerjasama dengan luar negeri seperti ini terus meningkat, terbukti dengan diadakan kerjasama dengan bagian-bagian dari negara lain atau lembaga- lembaga yang ada diluar negeri (lihat lampiran viii).